

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN RPJM
DESA BERDASARKAN WILAYAH DUSUN DI DESA KERTOSONO KECAMATAN
BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO**

Syamsudin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Korespondensi penulis: syam.cinde@gmail.com

Abstrak

Dasar dari pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa mendasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan memahami segala hambatan yang ada, serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dimana peneliti terlibat langsung dalam proses dan melakukan pengamatan secara langsung. Penelitian ini dilakukan tanpa melakukan perubahan, tambahan atau manipulasi terhadap data yang memang sudah ada. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pengamatan dan lembar observasi.

Penelitian bertujuan untuk mengeksklore mengenai tingkat partisipatif masyarakat, berdasarkan kewilayahan di dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa melalui Musyawarah Dusun. Pada penelitian ini terdapat 3 dusun dengan jumlah KK setiap dusun yang berbeda, dimana salah satu indikator tingkat partisipasi diambil dari prosentase kehadiran pada saat kegiatan Musyawarah Dusun. Berdasarkan data yang didapatkan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi tidak ditunjukkan oleh wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang lebih banyak maupun rata-rata tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Kata Kunci: Tingkat Partisipatif; RPJMDes.

Abstract

The research aims to explore the level of community participation, based on regionalism in the process of preparing the Village Medium Term Development Plan through the Dusun Deliberations. In this study there were 3 hamlets with a different number of households in each hamlet, where one indicator of the level of participation was taken from the percentage of attendance during the Dusun Deliberation activities. Based on the data obtained, it shows that the level of participation is not shown by areas that have a larger population or the average level of education is higher.

This research is a descriptive qualitative research where the is directly involved in the process and makes direct observations. This research was conducted without making changes, additions or manipulations of existing data. The research instrument used was observation sheets.

The research aims to explore the level of community participation, based on regionalism in the process of preparing the Village Medium Tern Devolopment Plan throught the village deliberations. In this study there were 3 hamlets with a different number of households in each hamlet, where one indicator of the level of participation was taken from the percentage of attendance the village deliberation activities. Based on the data obtained, it shows that the level of participation is not shown by regions that have a larger population or the average level of education is higher.

Keywords: *Participatory Level; RPJMDes.*

A. Latar Belakang

Idealnya pembangunan di desa dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa setempat. Tidak semua pembangunan menjadi prioritas di semua desa, artinya kebutuhan terhadap pembangunan baik fisik maupun non fisik di sebuah desa, hendaknya melihat permasalahan krusial yang dihadapi oleh desa tersebut, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan menjadi solusi bagi pemenuhan kebutuhan bukan hanya sekedar keinginan, apalagi menimbun masalah baru.

Dasar dari pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan memahami segala hambatan yang ada, serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Oleh karena itu untuk mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan ini, desa harus memiliki rencana pembangunan berjangka dan terukur. Yang dimaksud dengan rencana

pembangunan berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang biasa disebut dengan RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun. Penyusunan RPJM Desa ini, tentu saja diharapkan bukan hanya hasil pemikiran dari pemerintah Desa tetapi juga melibatkan partisipasi warganya sebagai penikmat langsung pembangunan. Pemerintah Desa harus mampu berperan sebagai fasilitator sejak pembentukan Tim penyusun RPJM Desa, yang pembentukan tim ini harus melibatkan berbagai unsur yang dapat mewakili masyarakat dan berperan dalam melibatkan partisipasi masyarakat. Langkah selanjutnya yang perlu difahami adalah, sebelum menyusun RPJM Desa, Tim penyusun harus memahami landasan hukum penyusunan perencanaan pembangunan desa atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Landasan hukum penyusunan RPJM Desa yang dimaksud, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dari kelima landasan hukum di atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi dasar penyusunan dan ketentuan pembentukan tim penyusun RPJM Desa, karena Permendes PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tersebut merupakan aturan hukum yang baru yang mengatur aspek yang sama dengan permendagri Nomor 114 Tahun 2014.

Lebih jauh mempelajari landasan penyusunan RPJM Desa ini, dalam Permendes PDTT Nomor 17 Tahun 2019 Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bertujuan untuk:

1. Mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa
2. Meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
3. Mengkonsolidasikan kepentingan bersama

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan
6. Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Dengan landasan dan tujuan di atas, maka partisipasi masyarakat Desa menjadi indikator utama dalam menentukan isi RPJM Desa yang representative bagi seluruh masyarakat di desa tersebut. Yang dimaksud dengan partisipasi, adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut” (Syamsuddin Adam dalam Prasetya, 2008:54).

Menurut Andriani (2018) Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi,

perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. Sedang di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theresia et all 2015:196)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dimana peneliti terlibat langsung dalam proses dan melakukan pengamatan secara langsung. Penelitian ini dilakukan tanpa melakukan perubahan, tambahan atau manipulasi terhadap data yang memang sudah ada. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pengamatan dan lembar observasi. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Fokus penelitian ini adalah keterlibatan warga berdasarkan wilayah tempat tinggal, guna memetakan metode pendekatan yang tepat untuk proses pemberdayaan selanjutnya. Penelitian tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa ini menggunakan tiga indikator sebagaimana yang disampaikan oleh Marshall (2006) : (1) Adanya suatu kelompok

untuk menampung partisipasi masyarakat, (2) Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses, (3) Adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.



Sumber:

<https://www.simpeldesa.com/blog/alur-penyusunan-rpjm-desa-bagian-1/1929/>

Ketiga indikator tersebut nampak dalam tahapan proses penyusunan Dokumen RPJM Desa. Di Desa Kertosono, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, yang menjadi obyek penelitian, terbaca kondisi masyarakat pada saat Musyawarah Dusun yang dilaksanakan oleh tim penyusun RPJM Desa. Pada proses penggalan usulan, sebelumnya dilakukan analisa SWOT dengan mempergunakan instrumen-instrumen sebagai berikut:

1. Kalender Musim
2. Peta Desa

3. Diagram kelembagaan
4. Sejarah Desa

Pengamatan dilakukan oleh peneliti selama proses pembentukan Tim penyusun RPJM Desa sampai dengan proses penggalian di tingkat dusun hingga penyusunan dokumen. Di Desa Kertosono, Kecamatan banyuuri, Kabupaten Purworejo proses pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa melibatkan lembaga desa dan Tokoh Masyarakat dengan memasukkan unsur keterwakilan perempuan. Tim kemudian menyusun jadwal Musyawarah Dusun guna melakukan penggalian usulan sebagai bahan penyusunan Dokumen RPJM Desa. Dalam proses inilah peneliti mengamati tingkat keterlibatan masyarakat di setiap wilayah Dusun di Desa Kertosono. Dari ketiga wilayah tersebut diperoleh data sebagai berikut:

Tabel. 1. Kehadiran Warga Dalam Musyawarah Dusun

Wilayah Dusun	Jumlah Undangan			Jumlah kehadiran			Prosentase Kehadiran		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Montelan	65	35	100	30	25	55	46%	71%	55%
Kerto	40	20	60	30	15	45	75%	75%	75%
Pandean	50	25	75	45	21	66	90%	84%	88%

Berdasarkan banyaknya masyarakat yang hadir dari undangan yang diberikan,

maka bisa dilihat bahwa dusun Pandean mempunyai prosentase kehadiran paling tinggi dibandingkan dusun yang lain. Tingkat kehadiran ini dipengaruhi banyak hal. Faktor penyebabnya bisa dikarenakan cuaca, pemilihan hari atau juga kegiatan yang bersamaan di lingkungan dusun. Pada proses musyawarah dusun yang dilaksanakan, peneliti mengamati ketiga proses waktu yang dipilih sudah diambil dari kesepakatan antara kepala Dusun dan tim Penyusun RPJM Desa. Dimana waktu tersebut pada kondisi masyarakat telah selesai masa tanam, artinya masyarakat Desa yang mayoritas petani berada dalam masa “angguran” (istilah masyarakat desa untuk menyebut masa pasca tanam). Selain itu, hari yang dipilih adalah di hari Sabtu Malam, yang memungkinkan bagi masyarakat yang bukan petani, misalnya karyawan atau PNS tidak terganggu aktivitas kerjanya.

Dilihat dari data jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan, dari ketiga wilayah dusun tersebut, Montelan mempunyai jumlah KK yang paling banyak, dari jumlah KK tersebut, jenis pekerjaan yang paling beragam adalah di wilayah Montelan pula, bahkan jumlah 9 PNS yang ada di Desa Kertosono, 7 diantaranya merupakan warga yang tinggal di Dusun Montelan, dan 2 orang merupakan warga Dusun Pandean.

Pada proses musyawarah, atusias masyarakat yang hadir beragam. Di Dusun Montelan, yang dikenal sebagai dusun di wilayah Kertosono dengan tingkat pendidikan warganya paling tinggi, dengan dasar hitung banyak warga dari Dusun Montelan ini meneruskan pendidikan sampai ke jenjang S1. Sementara warga Dusun Kerto dan Pandean cenderung mengambil jenjang pendidikan SMK yang kemudian mengambil kerja setelah kelulusan. Dan ternyata dari hasil pengamatan peneliti, diskusi yang muncul lebih pada adu argumen sehingga tim penyusun yang mencoba menggali dengan instrumen yang ada dengan menggunakan analisa SWOT nampak sedikit kewalahn, dikarenakan audiens menginginkan langsung merujuk pada program pembangunan, bukan melihat potensi, hambatan serta kebutuhan dasar dari masyarakat.

Lebih lanjut yang dimaksud dengan Analisa SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek.

ANALISIS SWOT



Sumber:

https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_SWOT

Berbeda dengan tipikal warga Desa Kerto, yang kompak dengan mendukung satu pendapat yang dianggap sudah mewakili warga dusun tersebut, meski penjajagan analisa SWOT tetap dilakukan. Warga Dusun Kerto cenderung untuk menyatukan pendapat. Sementara itu, proses dinamis yang membangun ditunjukkan dalam musyawarah dusun Pandean. Antusias warga terlihat dari proses analisa SWOT yang dilalui dengan senang hati kemudian merefleksikan dusun sebagai bagian dari Desa dengan memandang kekuatan, potensi, hambatan serta kelemahan yang dimiliki.

Partisipasi tampak dari keterlibatan warga yang hadir dalam menuliskan kalender musim, menggambar peta desa bersama-sama dan menentukan posisi kelembagaan desa

terhadap posisi masyarakat. Dari peran aktif warga, diharapkan masyarakat memahami potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh Dusun, baik yang berupa sumber daya alam, kondisi tempat tinggal, sumber daya manusia serta lembaga kemasyarakatan yang dimiliki dalam mengorganisir kelompok-kelompok masyarakat. Dan proses keterlibatan tersebut ditunjukkan dari jumlah warga yang menyampaikan pendapat dan bertanya serta berperan aktif selama pemetaan dilakukan. Masalah-masalah sosial yang dihadapi menjadi banyak tergal dan terpetakan.

Tabel. 2. Peran Aktif Warga Dalam Musyawarah Dusun

Wilayah Dusun	Jumlah hadir	Kalender Musim		Peta Desa		Diagram Kelembagaan	
		Berpendapat	Bertanya	Berpendapat	Bertanya	Berpendapat	Bertanya
Montelan (RW 1)	55 dari 100 Und	15	5	10	5	10	7
Kerto (RW 2)	45 dari 60 Und	10	7	15	10	15	10
Pandean (RW 3)	66 dari 75 Und	30	25	25	20	35	25

Dengan melihat kenyataan sosial yang diamati dalam proses penyusunan RPJM Desa di Desa Kertosono ini, peneliti mendapatkan fakta, bahwa tingkat pendidikan bukan menjadi penentu keterlibatan partisipatif, tetapi kebersamaan dan rasa memiliki tumpah darah menjadi faktor utama dalam merancang program pembangunan. Penyusunan

Dokumen RPJM Desa yang berlaku dalam jangka waktu 6 tahun ini memuat banyak program pembangunan yang bisa berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Karena program pembangunan yang direncanakan tentu saja membutuhkan pembiayaan, dan besarnya pembiayaan dalam satu program tersebut mengakibatkan masyarakat harus berlapang dada membuat prioritas. Dusun yang mempunyai kepemilikan Desa, akan dengan lapang dada menilai secara obyektif tingkat kemanfaatan dari sebuah program, semakin bermanfaat bagi banyak orang, mencangkup hajat hidup banyak orang maka, prioritas program tersebut semakin tinggi.

Tabel 3. Level Partisipasi menurut Arnstein:

8	Kendali Warga (<i>citizen control</i>)	Derajat Kuasa/Kekuatan Masyarakat (<i>Degree of Citizen Power</i>)
7	Kuasa yang didelegasi (<i>delegated power</i>)	
6	Kemitraan (<i>partnership</i>)	
5	Penentruman (<i>placation</i>)	Partisipasi Semu (<i>Tokenism</i>)
4	Konsultasi (<i>consultation</i>)	
3	Pemberian Informasi (<i>information</i>)	
2	Terapi (<i>therapy</i>)	Tidak Partisipatif (<i>Non Participation</i>)
1	Manipulasi (<i>manipulation</i>)	

Sumber: Sherry R Arnstein, A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners 35.1969, hal 216-224 dalam Bruce Mitchell, Resources and Environmental Management, First Edition. Addison Wesley Longman Limited.1997, hal 187.

Berikut contoh hasil musyawarah dusun pada saat melakukan analisa SWOT dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Desa.

Gambar 1. Kalender Musim

Masalah, Kegiatan, Keadaan	PASCARABIA			KEMARAU		
	Mei	Agust	Sept	Ok	Nov	Dagel
Kekurangan Air Bersih						
Kekurangan pangan						
Kesehatan (banyak penyakit)						
Banjir						
Panen						
Tanam						
Kelahiran Tenaga Kerja						



D. Penutup

D.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari pengamatan proses penyusunan Dokumen RPJM Desa di Desa Kertosono yang melibatkan tim penyusun yang melakukan pendampingan dalam pelaksanaan Musyawarah Desa untuk menggali informasi, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Tingkat pendidikan tidak menjamin proses penerapan Analisa SWOT di Desa Kertosono
- 2) Karakter komunal lebih dapat diajak berdiskusi membahas

masalah bersama dan mencari solusi bersama

Partisipasi ditunjukkan oleh masyarakat yang mempunyai persamaan nasib dan kondisi serta rasa kepemilikan terhadap daerah tempat tinggalnya.

E.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari proses hasil dan pembahasan, maka penulis dapat memberikan saran kepada pemerintah Desa Kertosono dalam proses perencanaan program pembangunan selanjutnya, sebagai berikut:

1. Untuk menjaga tingkat partisipatif masyarakat di dalam kemajuan Desanya, maka kegiatan Musyawarah Dusun perlu diagendakan secara rutin sebagai ajang membahas program-program pembangunan. Musyawarah Dusun ini juga berfungsi untuk menjalin komunikasi dan ajang pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi secara menyeluruh untuk diketahui semua warga.
2. Bahwa hasil penyusunan Dokumen RPJM Desa, hendaknya dilakukan review setiap tahunnya sehingga

terukur tingkat prioritas pembangunan di tahun berjalan.

3. Pemerintah Desa hendaknya memahami hasil Analisa SWOT dalam Musyawarah Desa yang berujud, kalender musim, peta desa dan diagram kelembagaan sebagai acuan dalam melakukan pendekatan dan prioritas pembangunan.

Dari data yang diperoleh dalam 3 wilayah yang melaksanakan Musyawarah Dusun, hendaknya pemerintah desa dapat melakukan pendekatan persuasif dengan memahami karakter warga yang berbeda di setiap wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dokumen RPJM Desa, Desa Kertosono Tahun 2019-2025, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo.

Henti, Faizal Aco, Idham Ibtu (2020, Desember). Hubungan Kepatuhan Penggunaan Dana Desa Terhadap Program Mitigasi Bencana “Studi Kasus Di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta” *Jurnal Enersia Publika*, Hal 197-211.

Moleong, Lexy. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Karya. Bandung.

Noor Widayati, Faizal Aco (2019, Desember). Pemanfaatan Dana Desa (DD) Di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. *Jurnal Enersia Publika*, Hal 156-175.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sugiyono (2003:74-78), *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Pusat Bahasa. Depdiknas.